

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Laporan keuangan merupakan alat informasi yang digunakan para *stakeholder* untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam kondisi baik atau buruk. Sehingga kualitas laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting, semakin baik nilai perusahaan maka akan semakin menarik minat investor untuk menanamkan modalnya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

##### **1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan, adanya asimetri informasi menyebabkan kemungkinan munculnya konflik antara pihak principal dan agent. Teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen (Jensen dan Meckling, 2008). Dalam teori keagenan pemegang saham bertindak sebagai pemberi wewenang, dan manajemen adalah pihak yang menerima wewenang. Pemegang saham memberi kepercayaan kepada manajemen untuk bekerja menjalankan kepentingan pemegang saham, untuk itu manajemen dituntut untuk bertanggungjawab dalam membuat keputusan dan strategi

Terkait dengan *corporate governance* maka konflik kepentingan dapat terjadi antara manajemen dengan investor. Manajemen yang seharusnya menjalankan wewenang, yang harus membuat strategi-strategi

untuk pencapaian tujuan perusahaan. Para investor memiliki kepentingan untuk memberikan wewenang kepada manajemen untuk membuat strategi dan kebijakan sehingga investor menuntut manajemen untuk bekerja secara optimal agar tujuan investor dapat tercapai.

## 2. Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)

Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik dalam mencapai kesesuaian antara faktor organisasi dan lingkungan untuk memperoleh prestasi yang baik bagi suatu organisasi, yang diperkenalkan oleh Lawrence dan Lorsch (1967). Warsono (2009) mengemukakan argument bahwa dasar dari teori kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan masyarakat menjadi pervasive sehingga perusahaan perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada pemegang saham saja.

Kaitannya dengan CSR, maka teori kontingensi menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kepentingan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan lain, seperti kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungannya. Sehingga apabila perusahaan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* perusahaan akan memiliki nilai yang baik dimasyarakat. Dengan adanya nilai baik tersebut maka kinerja perusahaan akan menjadi baik.

### **3. Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya (Jumingan, 2006:239). Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama periode tertentu, untuk mengetahui stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil (Munawir, 2002).

### **4. *Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal (stakeholder) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan tersebut (Widjaja dan Yeremia, 2008).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah diatur dalam undang-undang sejak 16 Agustus 2007 melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), Undang-Undang ini

mengatur bahwa semua jenis korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) baik itu berstatus swasta maupun Milik Negara.

Menurut Wibisono (2007) pelaksanaan program Corporate Social Responsibility oleh perusahaan memiliki beberapa motif, antara lain yaitu:

- a. Mengharapkan *social license to operate*
- b. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
- d. Memperbaiki hubungan dengan regulator
- e. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan
- f. Mereduksi biaya
- g. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- h. Melebarkan akses sumber daya
- i. Membentangkan akses menuju market
- j. Peluang mendapatkan penghargaan

## **5. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiyantoro,2007). Dengan adanya saham yang dimiliki oleh manajemen harapannya manajemen dapat terhindar dari perilaku yang mementingkan diri manajemen itu sendiri,

sehingga dengan adanya kepemilikan manajemen, maka kepentingan perusahaan dan kepentingan manajemen akan sama.

## **6. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et al, 2006). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham mayoritas, sehingga pemilik saham institusional memiliki hak untuk berpendapat dan membantu perusahaan dalam menentukan strategi, sehingga dapat terhindar dari konflik kepentingan antara perusahaan dan pemilik saham institusional.

## **7. Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen secara umum memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dibuat oleh manajer, sehingga dewan komisaris memiliki hubungan terhadap keberhasilan *corporate governance* (Wulandari, 2006).

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang tidak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan manajemen perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang

saham pengendali, dan bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Machmud dan Djakman, 2008).

## **8. Komite Audit**

Komite audit merupakan organ tambahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan prinsip *corporate governance*. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006).

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006) dalam bukunya, komite audit memiliki tanggung jawab, antara lain yaitu:

- a. Bidang laporan keuangan
- b. Bidang tata kelola perusahaan
- c. Bidang pengawasan perusahaan

Komite audit perseroan dibentuk sesuai keputusan Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2007. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka pengawasan terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan

manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007).

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **a. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Keuangan**

*Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala hal (stakeholder) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan tersebut (Widjaja dan Yeremia, 2008). Dengan menjalankan tanggung jawab sosial maka perusahaan akan mendapat citra yang positif, hal ini sangat penting bagi kepentingan ekonomis perusahaan seperti untuk pemasaran produk, dan meningkatkan penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien sehingga menghasilkan laba yang lebih dan ROA meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feb Tri Wijayanti, Sutaryo, dan Muhammad Agung Prabowo (2011) memperoleh hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan menggunakan ROE. Pada penelitian lain juga menemukan hubungan yang signifikan antara CSR dengan kinerja keuangan perusahaan (Rettab et al, 2008) Vergalli et al (2009). CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang

diprosikan dengan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) (Melisa Syahnaz, 2013).

Namun, ada penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan positif antara CSR dengan kinerja keuangan (Athnasia dan Maria, 2010). Pada penelitian Lindrawati, Felicia, dan Budianto (2008) juga memperoleh hasil bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Feb Tri Wijayanti, Sutaryo, dan Muhammad Agung Prabowo (2011) memperoleh hasil bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan menggunakan ROA dan EPS. Penelitian Marissa Yaparto et al (2013) dan Dwijayanti et al (2012) juga menghasilkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian, hipotesisnya adalah :

**H<sub>1</sub> : Pengungkapan *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.**

#### **b. Kepemilikan manajerial dan Kinerja Keuangan**

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiyantoro, 2007). Proposi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengidentifikasi ada kesamaan (congruence) kepentingan antara manajemen dengan pegang saham (Faisal, 2005). Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal



karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja (Machfudz, 2006).

Dengan manajemen memiliki kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan maka manajemen akan memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan pemilik, maka konflik kepentingan dapat dihindarkan. Dengan demikian semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen dalam pengelolaan perusahaan, manajemen cenderung akan meningkatkan kinerjanya, karena saham perusahaan juga dimiliki oleh manajemen itu sendiri, sehingga manajemen akan termotivasi dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk pencapaian kinerja keuangan perusahaan yang lebih tinggi.

Pada penelitian Arum Ardiansyah dan Komala Ardiyani (2010) memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang di proksikan menggunakan ROA. Pada penelitian Haryani, Linggar Pratiwi, dan Muchamad Syafruddin (2011), penelitian Yulius Ardy dan Yeterina Widi (2013), dan penelitian Dini Nur'aeni (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, hipotesisnya adalah :

**H<sub>2</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.**

### c. Kepemilikan institusional dan Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et al, 2006). Kepemilikan Institusional diharapkan mampu meminimalkan konflik keagenan karena manajer diharapkan bisa membuat keputusan utang dan dividen yang berpihak pada kepentingan pemegang saham institusional ini. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat membantu melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada manajemen perusahaan, sehingga perusahaan dapat bekerja secara efisien dan mendapatkan laba yang tinggi, dengan laba yang tinggi sehingga kinerja keuangan perusahaan akan meningkat.

Pada penelitian Triyono (2014), Dini Nur'aeni (2010), dan Hudan Diandono (2012) bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian Framudyo Jati (2009), Yulius Ardy dan Yeterina Widi (2013), dan Arum Ardianingsih dan Komala Ardiyani (2010) menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, hipotesisnya adalah :

**H<sub>3</sub> : Kepemilikan institutional berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.**

#### **d. Dewan komisaris independen dan Kinerja Keuangan**

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada setiap struktur organisasi yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi Dewan Komisaris Independen lebih banyak akan membuat manajemen dalam menentukan kebijakan akan lebih berhati-hati dan tidak memiliki kepentingan pribadi, sehingga tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang setinggi-tingginya akan tercapai dengan baik dan kinerja keuangan perusahaan akan meningkat.

Pada penelitian Maria Fransisca (2013), Tumpal Manik (2011), dan Hudan Diandono (2012) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian Iqbal Bukhori (2012), dan Kayati et al (2016) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Coller dan Gregory (1999) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Dengan adanya dewan komisaris maka manajemen perusahaan akan lebih termonitor dan mendapatkan nasihat untuk menjaga strategi agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian, hipotesisnya adalah :

**H<sub>4</sub> : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.**

**e. Komite audit dan Kinerja Keuangan**

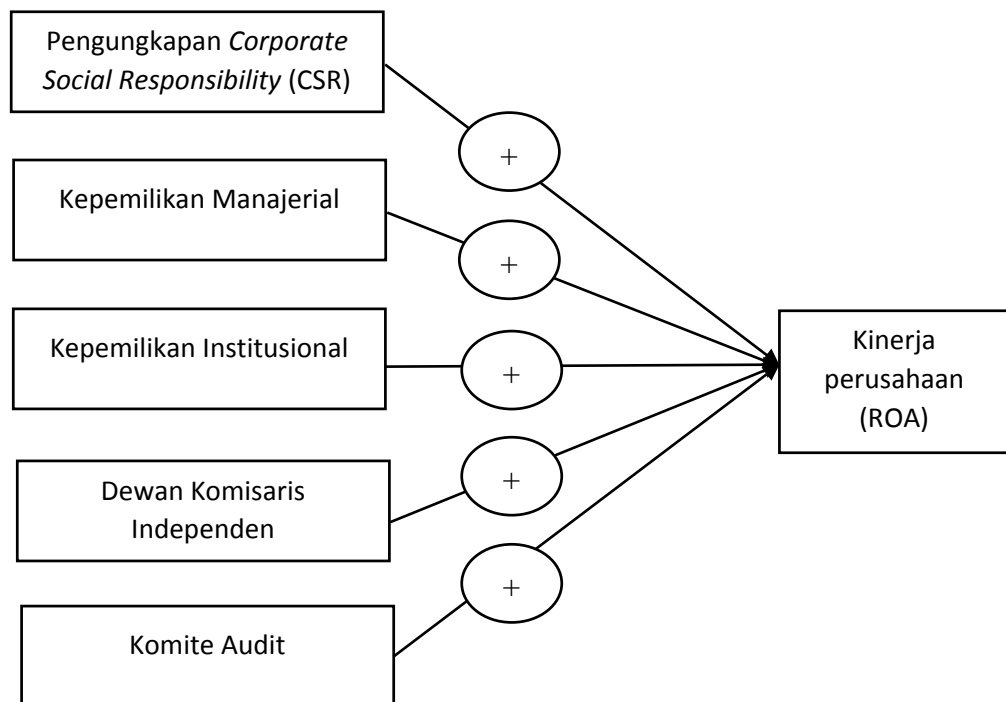
Komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris berguna untuk membantu dalam melakukan pengawasan direksi dan dewan manajemen, dan memastikan apakah penerapan prinsip – prinsip GCG pada perusahaan telah berjalan dengan baik. Komite audit perseroan dibentuk sesuai keputusan Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2007. Dengan demikian komite audit akan melakukan pengawasan terhadap auditor internal didalam perusahaan akan lebih ketat, sehingga perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang dapat menyebabkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi sehingga kinerja keuangan perusahaan akan meningkat.

Pada penelitian Nita Ayu Widyasari, Suhadak, dan Achmad Husaini (2015) menemukan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian Romano (2012), Muhammad Ainurrofiq (2016), dan Hudan Diandono (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan.

**H<sub>5</sub> : Komite audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.**

### C. Model Penelitian

Bagian model penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan bentuk hipotesis yang dirumuskan. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**